

ABSTRAK

SRI HIKMA UMATERNATE, Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polres Kepulauan sula) Dibimbing oleh (Muhaimin Limatahu dan Faisal).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Peran Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2) mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Kepulauan Sula.

Kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem hukum Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga" (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)".

Penelitian ini dilakukan di Polres Kepulauan Sula. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris yaitu pendekatan penelitian dengan melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan kenyataan di lapangan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara di lapangan yang dianalisa dan narasikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Peran penyidik terhadap kasus Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dilaksanakan dengan prinsip penegakan Hukum secara terpadu, yaitu pemeriksaan tersangka dan sekaligus pemberian hak-hak korban KDRT. (2) Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Kabupaten Kepulauan Sula yang ditemui yaitu hambatan dalam mediasi penal biasanya tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Peghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sedangkan, hambatan dalam proses hukum yaitu sulitnya pengumpulan bukti permulaan dikarenakan oleh sikap korban itu sendiri yang terkadang sulit diwawancarai. Selain itu, ada beberapa kasus yang dilaporkan sering tidak dilanjutkan oleh karena korban mencabut laporannya. Hal ini karena beberapa korban yang memilih untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan.

Kata Kunci: Penyidik, Kekerasan Rumah Tangga

ABSTRACT

SRI HIKMA UMATERNATE, The Role of Investigators in the Settlement of Domestic Violence Elimination (Sula Islands Police Case Study) Guided by (Muhaimin Limatahu and Faisal).

This research aims to (1) find out the Role of Investigators in the Settlement of Domestic Violence Elimination Crimes (2) to know what factors hinder the resolution of domestic violence cases in the Sula Islands Police.

In fact, cases of domestic violence (KDRT) occur a lot. Indonesia's legal system has not guaranteed protection against victims of violence that occurs within the scope of the household. What is meant by domestic violence is: "Any act against a person, especially a woman, resulting in the onset of misery or suffering physically, psychologically and/or neglect of the household including the threat to commit acts, coercion or deprivation of legal independence within the scope of the household" (Article 1 paragraph (1) of Law No. 23 of 2004)".

The study was conducted at the Sula Islands Police Station. The type of research used is juridical-empirical, namely the research approach by explaining the problems studied based on reality in the field, while the data analysis technique used is qualitative by using data generated in the form of sentence descriptions or explanations. Data is obtained from literature studies and interviews in the field analyzed and narrated in descriptive form.

The results of the study showed (1) the role of investigators in domestic violence cases was carried out based on the Criminal Procedure Law And Law No. 23 of 2004 which was carried out with the principle of integrated law enforcement, namely the examination of suspects and at the same time the granting of the rights of domestic violence victims. (2) Factors that hinder the resolution of domestic violence cases in the Sula Islands District Police encountered are obstacles in penal mediation usually the absence of a process or settlement procedure that is directly regulated in Law No. 23 of 2004 concerning domestic violence. Meanwhile, obstacles in the legal process are the difficulty of gathering preliminary evidence due to the attitude of the victim itself which is sometimes difficult to interview. In addition, there are some cases that are reported often not continued because the victim revokes his report. This is because some victims choose to solve cases in a family manner.

Keywords: Investigators, Domestic Violence